

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB
NOMOR: KEP/ 2 /II/REN.1.3./2026, TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB

Nomor: Kep/ 2 /II/REN./2026

tentang

RENCANA KERJA BID TIK POLDA NTB TAHUN 2026
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB

Menimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bid TIK Polda NTB dalam membantu kinerja Kepolisian Polda NTB, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rencana Kerja Bid TIK Polda NTB Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

8. Surat Perintah Kabid TIK Polda NTB Nomor: Sprin/ 78 /V/REN.1.3./2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja Bid TIK Polda NTB Tahun Anggaran 2026.

/ Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menetapkan : 1. Rencana Kerja Bid TIK Polda NTB tahun 2026;

2. Rencana Kerja Bid TIK Polda NTB dimaksud, untuk dijadikan pedoman dalam Pelaksanaan tugas pada Satker Kerja Bid TIK Polda NTB tahun 2026;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di: Mataram

pada tanggal : 20 Februari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

RENCANA KERJA
BIDANG TIK POLDA NTB TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Bid.TIK adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Polda yang dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kamtibmas dan pelayan multimedia yang mana dalam hal ini Bid TIK Polda NTB sebagai pembina fungsi pada Sie TI Polres Jajaran yang di dukung dengan peralatan informasi dan komunikasi, untuk itu perlu dilaksanakan upaya atau langkah-langkah strategis yang terencana, terprogram dan terarah dalam berbagai aspek baik dalam aspek struktural, instrumental maupun kultural melalui kegiatan operasional maupun pembinaan serta dibidang manajemen yang terprogram berdasarkan tugas pokok masing-masing Sub Satker sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Rencana Kerja Bidang TIK Polda NTB T.A. 2026 merupakan dokumen Perencanaan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Nusa Tenggara Barat untuk periode satu tahun yang disusun mengacu pada Rencana Strategis Polda NTB, Rencana Strategis Bid TIK Polda NTB, Renja Polda NTB, Renja Polda NTB dan Manual IKU Bid TIK Polda NTB yang mengacu pada Visi, Misi, Program dan Prioritas Pembangunan Polda NTB.

Dalam hal ini Bid TIK polda NTB mengakomodir permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja satker Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB yaitu Masih terdapatnya sistem daerah yang memiliki topografi berbukit dan bergunung belum dijangkau jaringan komunikasi elektronik, Belum tergelarnya perangkat Alkomlek di pulau-pulau terluar.

/Bid TIK...

Bid. TIK Polda NTB di pimpin oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda NTB yang mempunyai tugas diantaranya pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan pengolahan data, serta pelayanan telekomunikasi dan pemberian bimbingan, bantuan teknis penyelenggaraan TIK kepada satuan organisasi di lingkungan polda NTB.

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

Bid TIK bertugas menyelenggarakan pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi Kamtibmas dan pelayanan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas, Bid TIK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2) Pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan pengolahan data, serta pelayanan telekomunikasi;
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, pengamanan sistem, penyajian informasi dan dokumentasi, serta analisis dan evaluasi;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi Kamtibmas, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan; dan
- 5) Pemberian bimbingan, bantuan teknis penyelenggaraan TIK kepada satuan organisasi di lingkungan Polda NTB.

Dalam melaksanakan tugas Kabid TIK dibantu oleh fungsi :

- 1) Subbagrenmin;
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c) Pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

/d. pelayanan...

- d) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e) Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- 2) Subbidtekkom
- a) Pembinaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda
 - b) Pengembangan dan penyelenggaraan teknologi jaringan komunikasi, meliputi teknologi media fisik komunikasi, teknologi *interface communication* (komunikasi antar muka), teknologi dan prosedur penyambungan dan perutean data dalam komunikasi;.
 - c) Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan pelayanan sentra komunikasi; dan
 - d) Pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem teknologi komunikasi.
- 3) Subbid Tekinfo :
- a) Pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi di lingkungan Polda
 - b) Pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengumpulan dan analisis data guna pengembangan data *warehouse* dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi, dan keamanan sistem informasi;
 - c) Pembinaan dan penyelenggaraan sistem penyajian informasi meliputi penyajian informasi dalam bentuk tertulis, audio, video, dan layanan multimedia dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras, program aplikasi, dan keamanan sistem informasi

b. Analisis SWOT

1) Kekuatan

- a) Jumlah DSP Riil personel Bid TIK sebanyak 60 orang personel, sedangkan DSP sebanyak 51 orang personel (Brigadir). Dengan kelebihan 4 jumlah personel ini merupakan tambahan kekuatan yang dimiliki Satker Bid TIK, dengan klasifikasi :

(1) Polri	: 55
(2) PNS	: 5
(3) Struktur Pangkat	
KOMBES	: 1
AKBP	: -
Kompol	: 3
AKP	: -
Inspektur	: 4
BA	: 47
TA	: -
Pns Gol III	: 3
Pns Gol II	: 2

(1) Struktur jabatan

Kabid	: 1
Kasubbid	: 2
Kasubbag	: 1
Kaur	: 4
Pamin	: 6
Paur	: 3
Banum	: 41
Pama	:
Anjak	: -

- b) Peralatan yang dimiliki Bid TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai berikut :

(1) Ranmor R-4	: 10 unit
- Jeep	: 2 unit
- Ops TSV	: 8 unit
(2) Ranmor R-2	: 2 unit
(3) Mesin kantor	
- Mesin PC	: 15 unit
- Vicon	: 1 Set

(4) Data Alkomlek

NO	JENIS ALKOM			TAHUN PENGADAAN/ PENERIMAAN	JML	KONDISI			KET
						B	RR	RB	
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	HANDY TALKY	UHF	400 MHz						
			800 MHz	2010-2017	3545	2804	217	524	
2.	REPEATER	UHF		2010-2017	37	14	9	8	
3.	RADIO MOBIL	UHF		2010-2017	161	123	22	16	
4.	BASE STATION	UHF		2010-2017	125	102	10	9	
5.	KOMPUTER			2008-2014	26	16	10		
6.	RADIO HF / SSB			2001	2			2	
7.	FAKSIMILE			2001	1		1		
8.	SOUND SYSTEM			2013-2019	5	4		1	
9.	PABX			2001	1			1	
10.	EXTENTION PABX			2001	75			75	
11.	SALURAN TELKOM								
12.	CONFERENCE SYSTEM			2013	1	1			
13.	WIRELLES			2012-2014	138	129	7	2	
14.	TEST BAND			2011	1		1		
15.	LOGIC CCT ANALIZER			2011	1		1		
16.	SWR			2011	1			1	
17.	MECHANICAL TOOL			2011	2	1	1		
18.	ELECTRONIC TOOL			2011	2	1	1		
19.	MOBIL KOMOPS			2004-2011					
20.	GENSET				4	2	2		
21.	SST TOWER 75			2015	6	6			
22.	TRIANGLE 40			2015	2	2			

- c) Terjalannya kerjasama dengan instansi di bidang komunikasi seperti PT. Telkom dan Operator Selular dalam mencegah aksi teror dengan jaringan komunikasi;
- d) Tergelarnya jaringan internet Telkomsel *Flash* pada Polsek Jajaran yang tidak terdukung infrastruktur Telkom guna mendukung sistem pelaporan online serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan teknologi berbasis IT;
- e) Tergelarnya jaringan internet untuk mendukung Aplikasi pelayanan publik berbasis IT di Polda NTB dan Polres Jajaran sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

/f) Adanya...

- f) Adanya sistem jaringan LAN dan WAN yang sudah tergelar di Mapolda NTB dan Polres jajaran sehingga sistem pelaporan secara *online* dapat beroperasi dengan baik;
- g) Tergelarnya jaringan internet untuk mendukung perangkat *Contact Center* Polri dengan nomor akses 110 guna mengetahui informasi dan pengaduan dari masyarakat NTB;
- h) Tergelarnya jaringan internet untuk mendukung Sistem Aplikasi Piknas di Polda NTB dan Polres jajaran dalam menghimpun data – data kriminalitas dan laka lantas di daerah guna mendukung informasi kriminalitas dan laka lantas tingkat nasional;
- i) Tergelarnya perangkat *Command center* di Polda NTB sehingga setiap potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polda NTB dapat dipantau dan diminimalisir.;
- j) Tergelarnya perangkat *Vicon* di Polda NTB dan Polres Jajaran sehingga komunikasi secara *audio visual* secara langsung dapat terlaksana dalam memberikan laporan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda NTB;

2) Kelemahan

- a) Masih kurangnya petugas yang memiliki keterampilan untuk merawat dan memperbaiki peralatan pendukung tugas pokok Kepolisian khususnya Alkomlek;
- b) Masih terdapat anggota yang belum memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga anggota mengalami kendala dalam mengoperasikan perangkat teknologi tersebut;
- c) Masih terdapat jabatan kosong yaitu Kaur Yankom, Kaur Jarkom, Kaur Yanduknis, Kaur Inti, Kaur Pullahta, dan Paur-1 Subbidtekkom;
- d) Masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus untuk beberapa penugasan khusus oleh para anggota Bidang TIK Polda NTB;

/e) masih...

- e) Masih belum mampu dari segi anggaran dan sumber daya manusia untuk menerapkan teknologi informasi *online* dari Polsek ke Polda/Mabes Polri dan sebaliknya.
- 3) Peluang
 - a) Kelebihan 4 jumlah personel ini merupakan tambahan kekuatan yang dimiliki Satker Bid TIK Personel Bidang TIK;
 - b) Polda NTB yang memiliki keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) Jumlah peralatan yang cukup memadai untuk mendukung kelancaraan komunikasi kewilayahaan dan kelancaran kirim terima informasi melalui teknologi internet dan intranet.
- 4) Ancaman
 - a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sudah tergelar dikarenakan masih minimnya kemampuan dan pengetahuan anggota dalam perawatan perangkat dimaksud;
 - b) Sulitnya memperbaiki perangkat teknologi informasi dan komunikasi khususnya alkomlek dikarenakan keterbatasan *spare part* yang terdapat di wilayah NTB;
 - c) Kurangnya petugas yang menjaga perangkat alkomlek yang ditempatkan pada site Polri maupun site PT. Telekom, TVRI, PLN sehingga perangkat rawan terhadap tindakan pencurian.

2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Satker Bidang TIK Polda NTB, antara lain:

- a. Masih kurangnya keterampilan personel dibidang Alkomlek dan Teknologi Informasi;
- b. Belum maksimalnya pengembangan sistem informasi *online* di tingkat Satker Polda, Polres sampai dengan tingkat Polsek;
- c. Terbatasnya tenaga yang ahli dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi;

/d. Masih...

- d. Masih terdapatnya sistem daerah yang memiliki topografi berbukit dan bergunung belum dijangkau jaringan komunikasi elektronik;
- e. Masih minimnya sarpras untuk pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Belum tergelarnya perangkat Alkomlek di pulau – pulau kecil berpenghuni di wilayah hukum Polda NTB.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS POLDA NTB DAN BID TIK POLDA NTB

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas Polda NTB

a. Visi Polda NTB

“Terwujudnya wilayah hukum Polda NTB Maju yang aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”

b. Misi Polda NTB

“Melindungi, melayani dan Mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polda NTB”

c. Tujuan Polda NTB

Tujuan Polda NTB merupakan penjabaran Visi dan Misi Polri dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan Polda NTB pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Polda NTB. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan Polda NTB yang akan dituju pada tahun 2029 yaitu “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel”.

d. Sasaran Prioritas Polda NTB

- 1) Kepolisian yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda NTB;
- 2) Kepolisian yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel;
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan publik Polri yang semakin inovatif;
- 4) Organisasi dan SDM kepolisian yang adaptif, kompeten dan berintegritas;
- 5) Infrastruktur teknologi dan logistik Polri yang tangguh aman dan mudah digunakan dengan memanfaatkan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)*;
- 6) Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* organisasi dengan menyempurnakannya.

/4. Visi...

4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas Bidang TIK Polda NTB

a. Visi Bidang TIK Polda NTB

“Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang profesional dan modern”

b. Misi Bidang TIK Polda NTB

“Peningkatkan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Bidang TIK Polda NTB yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan Siskominfo Polri yang terintegrasi, handal dan aman;
- 2) Meningkatkan dan tergelarnya Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- 3) Meningkatkan kemampuan personel Polda NTB di bidang komunikasi dan informasi.

c. Tujuan Bid TIK Polda NTB

- 1) Pengembangan dan beroperasinya sarana prasarana infrastruktur TIK dan meningkatnya intelektual SDM personel BID TIK Polda NTB;
- 2) Peningkatan integrasi kualitas, kuantitas pengumpulan dan penyajian data Kepolisian dari tingkat pusat sampai ketingkat bawah.

d. Sasaran Prioritas Bid TIK Polda NTB

- 1) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana yang berbasis IT;
- 2) Terwujudnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda yang modern;
- 3) Terwujudnya pengoptimalan/penggelaran Alkom dan Multimedia serta jaringan VPN-Ip/Internet;
- 4) Terwujudnya personel Polri/PNS Polri yang profesional di bidang IT;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLDA NTB DAN BID TIK POLDA NTB

5. Arah Kebijakan dan Strategis Polda NTB

Guna bermakna upaya dan capaian kinerja Polda NTB tidak hanya dilakukan sekali waktu, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus agar dampaknya efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkesinambungan serta mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda NTB Tahun 2026, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Sasaran Prioritas Kesatu: “Kepolisian yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda NTB”, untuk mencapai sasaran prioritas tersebut ditetapkan 11 (sebelas) arah kebijakan yaitu:
 - 1) meningkatkan kegiatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - Meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150, prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa)
 - 2) Meningkatkan dan memperkuat upaya pengamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif, untuk mewujudkan arah kebijakan *strategi* yang akan dilakukan:

/a) meningkatkan...

- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat (giat 5076, progHarkamtibmas /SP1/ SS1 /IKUa);
- b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (giat 3143, progLidiksidik, giat 3149, progdukma/SP1/ SS1/IKUa);
- c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama Igaras (Ideologi garis keras) yang telah mengikuti program moderasi beragama, dalam penanganan kasus terorisme; (giat 3143, progLidikSidik; giat 3128, 5076, progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa);
- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks napi terorisme beserta keluarganya; (giat 3143, progLidikSidik; 5076, progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa);
- e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (giat 314, progDukma/ SP1/SS5/IKPc);
- f) melaksanakan “edukasi” dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang *illegal* melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (giat 3070, 3149, progDukma/SP1/SS5/IKPg);
- g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata; (giat 3130, 3131, 5081, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa).

- 3) mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (*Cooling System*); untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang *illegal*; (giat5076, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat5076, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP; (giat 3133, 5076, progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan; (giat 3133, progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/IKUa).
- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis di tengah masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarpras yang modern; (giat 5087, progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan kegiatan patroli ditempat rawan konflik secara rutin dan berkelanjutan (giat3130, progharkamtibmas/SP1/SS1/IKUa).

- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat; (giat 3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas; (giat3130, 3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Pertumbuhan Ekonomi” serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (giat3131, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa).
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) personel Brimob Polda NTB yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi; (giat 5087, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; (giat3130,5081,5087,progHarkamtibmas/SP1/ SS1/IKUa);
 - c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan banjir oleh “Bhabinkamtibmas” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana; (giat 5076, progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa).

/7). melaksanakan

- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional selama Tahun 2026, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Satbrimob Polda NTB dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat berlangsung *event* nasional/internasional berlangsung; (giat 5079, 5087, prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan pengamanan *event* nasional Tahun 2026; (giat 5079, 3130, 3133, 5087, 3116, prog Harkamtibmas / SP1 / SS1 / IKUa);
 - c) melaksanakan Operasi Kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* internasional Tahun 2026; (giat3130, 3133, 5079,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan kerjasama keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait; (giat 3122, progHarkamtibmas).
- 8) meningkatkan respon Kepolisian serta melaksanakan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan ancaman gangguan, Kamtibmas dan Penegakan Hukum serta menjalin sinergisitas polisional; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka *back up* pengamanan wilayah rawan konflik; (giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif; (giat 5076, 5087, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas; (giat 3130, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - /d). melaksanakan

- d) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba; (giat 5081, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - e) melaksanakan kerja sama keamanan dan ketertiban antara Polri dengan instansi terkait; (giat 3120, progHarkamtibmas).
- 9) meningkatkan Kolaborasi dalam kerja sama kepolisian dengan *Stakholder* terkait guna mendukung stabilitas Kamtibmas, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan kerja sama antara Polri dalam rangka meningkatkan sinergi dengan “*stakeholder*” terkait; (giat 3120, progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan kerja sama guna mendukung kerja sama Polri, dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polda NTB untuk meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat; (giat 3122, progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan pulau terluar (Pulau Shomialusia); (giat 3122,progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa).
- 10) meningkatkan kegiatan *surveillance* patroli kapal Polri di wilayah perbatasan pulau terluar (Pulau Shomialusia) guna mendukung terlaksananya pengamanan laut/pesisir; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan “*back up*” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan “*back up*” patroli dengan mobilisasi kapal patroli Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan; (giat3135,progHarkamtibmas/SP1/SS1/ IKUa).
- 11) meningkatkan kehadiran anggota Polri di wilayah perbatasan pulau terluar (pulau Shomialusia) dan pulau berpenghuni; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kegiatan pengamanan diwilayah perbatasan pulau terluar dan pulau berpenghuni meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan; (giat 3130, prog. Harkamtibmas/ SP1 /SS1 / IKUa);
 - b) menyelenggarakan kerjasama keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait; (giat3122,progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa);
 - c) menyelenggarakan kegiatan patroli kepolisian perairan diperbatasan pulau terluar (Pulau Shopialusia) dan pulau berpenghuni. (giat3134,prog Harkamtibmas/ SP1/SS1/IKUa).
- b. Sasaran Prioritas Kedua: “Kepolisian yang Efektif dan Adaptif dalam Menegakkan Hukum Secara Adil dan Akuntabel”, untuk mencapai sasaran prioritas tersebut ditetapkan 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
- 1) meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) penindakan tindak pidana: umum, terorisme, narkoba, ekonomi khusus, korupsi, siber, tertentu, kepolisian perairan dan lau lintas ; (giat 3142, 31443, 3144, 3145, 3146, 3151, 5083, 3134, prog. lidiksidik);
 - b) melaksanakan pelayanan fungsi Sabhara (giat4343, progHarkamtibmas)
 - 2) melanjutkan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi penyidik Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri (giat 3100,progprofesionalismeSDMPolri).
 - 3) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana; (giat5086,proglidiksidik);
 - b) melaksanakan pembinaan operasional penyelidikan dan penyuidikan tindak pidana; (giat5082,progLidiksidik);
- /4) memperkuat...

- 4) memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan yang ditangani Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan melalui penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - melaksanakan pengawasan penyidikan melalui pendataan dan pelayanan informasi kriminal nasional; (giat 5086,progLidiksidik).
- c. Sasaran Prioritas Ketiga: “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif”, untuk mencapai sasaran prioritas tersebut ditetapkan 6 (enam) arah bijakan yaitu:
 - 1) mengoptimalkan kegiatan JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH” sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik dari masyarakat dan *stakeholder* terkait; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan instansi terkait dalam mendukung Kamtibmas; (giat 5076,progHarkamtibmas);
 - 2) meningkatkan Layanan kecepatan dan efektivitas respons polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pembinaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data operasi kepolisian (giat 5080, prog. Harkamtibmas);
 - b) melaksanakan pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;(giat 3130, prog. Harkamtibmas);
 - c) meningkatkan pelayanan Polri melalui berbasis teknologi. (Giat 5055, prog. dukma).
 - 3) melanjutkan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas layanan masyarakat yang berbasis TIK yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:

/a) melaksanakan...

- a) melaksanakan pengembangan peralatan Polri sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing yang tepat guna pada setiap Satwil; (giat 3084, Prog. Modernisasi Alamsus dan sarana prasarana Polri);
 - b) penyelenggaraan peralatan teknologi komunikasi dan informasi yang modern; (giat 5055, 3071, prog. Dukma);
- 4) meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri; (giat3100, progProfesionalismeSDMPolri);
 - b) memberikan penyuluhan, pelayanan ke masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Polri dalam mendukung Harkamtibmas; (giat5076,3133, progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);.
- 5) mengoptimalkan pelayanan di SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) memberikan pelayanan kepada masyarakat secara humanis dalam penanganan Tindak pidana; (giat3142, progLidikSidik);
 - b) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri;(giat3100, progprofesionalisme SDMPolri).
- 6) meningkatkan *quick response* Layanan Kesehatan kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada pegawai Polri; (giat3072,progDukma).
- d. Sasaran Prioritas Keempat: “Organisasi dan SDM Kepolisian yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas”, untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka terdapat 8 (delapan) arah kebijakan yaitu:
 - 1) Melanjutkan peningkatan kualitas 8 standar pendidikan yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui pembelajaran dan inovasi; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:

- Menyelenggarakan kurikulum pendidikan dan latihan Polri; (giat5070,progProfesionalismeSDMPolri).
- 2) Mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE; (giat5052,progDukma/SP4/ SS5/IKPe);
- 3) meningkatkan kapabilitas SDM Polri yang unggul melalui revitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan :
 - a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting* dan *Reward*); (gia t3107/prog. Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas berdasarkan kebijakan *zero growth*, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN; (giat3107, progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya; (giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif; (giat3107,progProfesionalismeSDM Polri/ SP4/SS3/IKPa)

/4) Melanjutkan...

- 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan serta perpanjangan MoU Kermadiklat dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; (giat5059,progProfesionalisme SDMPolri);
 - b) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan *Computer Asisted Test* (CAT) di tingkat Polda; (giat3108, progProfesionalisme SDMPolri);
- 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang professional dan humanis melalui penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang system manajemen kinerja secara menyeluruh, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pengusulan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kinerja berbasis anggaran; (giat5054,progDukma)
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”; (giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya; (giat 3108 ,prog. Profesionalisme SDM Polri/SP4/SS3/IKPa).
- 6) menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personil dan organisasi; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - melaksanakan pembinaan karier personel Polri; (giat3008, progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- 7) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyelenggarakan pendidikan dan latihan Polri; (giat3100, ProgProfesionalismeSDMPolri);
 - b) menyelenggarakan akreditasi, standardisasi profesi melaksanakan penegakan etika profesi; (giat3088,progDukma).
- 8) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) memberikan pelayanan kesehatan terhadap pegawai Pada Polri; (giat 3072,progDukma);
 - b) menyelenggarakan pengadaan perumahan, BPJS bagi pegawai Polri. (giat3105,progprofesionalismeSDMPolri);
- e. Sasaran Prioritas Kelima: “Infrastruktur Teknologi dan Logistik Polri yang Tangguh Aman dan Mudah Digunakan dengan Memanfaatkan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)*”, dengan arah kebijakan:
 - 1) memodernisasi serta memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri; (giat 5060, prog. Modernisasi AlmatsusSarpras Polri/ SP5/SS4/ IKPb);
 - b) melanjutkan pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan; (giat3084,prog ModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - /c) melanjutkan...

- c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pengusulan pembangunan gedung BPKB prototipe dan gedung Satpas prototipe; (giat3084, progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - d) pengusulan peralatan penanganan awal bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat; (giat3084, progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)
 - e) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan *event* nasional/internasional Tahun 2026, pengamanan pulau terluar perbatasan dan Destinasi Wisata; (giat3084, progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - f) pengusulan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi di wilayah Pulau kecil berpenghuni dan wilayah rawan bencana; (giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - g) pengusulan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (MEPE); (giat5060,progModernisasi AlmatsusSarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);
- 2) mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengkajian pengembangan perbekalan umum; (giat5061, progModernisasiAlmatsusSarprasPolri);
 - b) penyelenggaraan pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri (giat5062,progDukma).
- 3) pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah Hukum Polda NTB, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
- melanjutkan pengusulan pembangunan fasilitas perkantoran, pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri di wilayah, destinasi wisata di jajaran Polda NTB; (giat5062, progModernisasiAlmatsusSarpras Polri).

/4) melanjutkan...

- 4) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatesus *Scientific Criminal Investigation* (SCI), untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - melanjutkan pengusulan pengembangan peralatan laboratorium forensik dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana; (giat5062, progModernisasiAlmatesus SarprasPolri/SP5/ SS4/IKPb);
- 5) melanjutkan pengembangan Almatesus *Scientific Criminal Investigation* (SCI), untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengusulan pengembangan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini; (giat3084, progModernisasi AlmatesusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - b) pengusulan pemenuhan pengembangan sarana prasarana indentifikasi kepolisian terkini guna mendukung pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik kepolisian; (giat3084, progModernisasiAlmatesusSarprasPolri/SP5/ SS4/IKPb);
- 6) melanjutkan pembangunan Mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform* dan *Software* (DDPS) yang terintegrasi dalam Satu Data Polri yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pengembangan peralatan Polri; (giat3084,prog ModernisasiAlmatesus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat; (giat5055, progDukma/SP5/SS4/IKPb);
 - c) mengembangkan teknologi komunikasi dan informatika Kepolisian berdasarkan hasil penelitian; (giat3084,progModernisasiAlmatesus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb).

/7) mengoptimalkan...

- 7) mengoptimalkan sistem *hotline* 110 dalam menerima dan merespon pengaduan/pelaporan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:

- Menyelenggarakan teknologi komunikasi (giat 5055, prog. Dukma).

- f. Sasaran Prioritas Keenam: “Meningkatkan Akuntabilitas dan *Agility* Organisasi dengan Menyempurnakan Model Tata Kelola dan Model Operasional”, untuk mencapai sasaran prioritas tersebut, maka terdapat 6 arah kebijakan yaitu:

- 1) meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (giat3089, 3091, progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*; (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat3091, progDukma/ SP6/SS5/IKPg);
- d) melaksanakan pengawasan penyidikan (giat 5086,progLidikSidik);
- e) melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi; (progDukma).

- 2) melanjutkan pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan liar (Pungli) di lingkungan internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (giat3091, progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*; (giat3091,progDukma/ SP6/SS5/IKPg);

/c) mengoptimalkan...

- c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (giat 3091, prog. Dukma/SP6/SS5/ IKPg);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk pungli; (giat3089,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk pungli; (giat3089, progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan “operasi bersih” terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (giat3089, progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak professional) serta perbuatan korupsi di internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System* (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (giat3089, progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri; (giat3068, progDukma/SP6/SS5/IKPf);

- 5) menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polri dalam e-Jakstra dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polri yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri; (giat5051,progDukma/SP6/ SS5/IKPf);
 - b) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (giat3068,,4339,5054, progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - c) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (giat3068,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- 6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan standardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP serta melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana dan penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru; (giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melaksanakan Perubahan Peraturan Kepolisian tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor; (giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- 7) mengoptimalkan pelaksanaan reformasi mengoptimalkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik Polri di tengah masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri.

Dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat 5053 ,prog. Dukma/SP6/SS5/IKPd);

- b) Polres/Polresta sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPd);
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (giat5053,progDukma/SP6/SS5/ IKPd);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053, progDukma/ SP6/SS5/IKPd);

6. Arah Kebijakan dan Strategi Bid TIK Polda NTB

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Bid TIK Polda NTB Tahun 2026, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Sasaran Prioritas I *“Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana yang berbasis IT”* dengan arah kebijakan ***“berkembangnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum”*** dan strategi yang dilakukan adalah :
 - 1. Mewujudkan pengembangan teknologi Kepolisian dan system informasi yang berkelanjutan dan berintegritas; (giat5053/prog1/Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri).

/2. Mewujudkan...

2. Mewujudkan pengembangan pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi ke Mabes Polri. *giat5053/prog1/ Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri).*
- b. Sasaran Prioritas II *"Terwujudnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda yang modern"* dengan arah kebijakan ***"Terbangunnya system teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres"*** dan strategi yang dilakukan adalah :
 - 1) Mengoptimalkan/Menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung system pelaporan Kamtibmas; *(giat5053/prog1/ Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri).*
 - 2) Mengembangkan system komunikasi berbasis radio untuk mendukung Operasi Kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan disetiap fungsi dan wilayah. *(giat5053/prog1/ Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri).*
- c. Sasaran Prioritas III *"Terwujudnya pengoptimalan/penggelaran Alkom dan Multimedia serta jaringan VPN-Ip/Internet"* dengan arah kebijakan ***"Optimal dan tergelarnya jaringan Alkom dan VPN-Ip/Internet di satuan kerja di Polda dan satuan kerja di Kewilayahan"*** dengan strategi yang dilakukan adalah ***"Mengembangkan system komunikasi perkantoran berbasis IP untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda dan satuan kerja di Kewilayahan secara efektif dan efisien"***; *(giat3071/prog2/ SP3/SS/IKP3/PPK prog 4, giat 9, Renaksi 035).*
- d. Sasaran Prioritas IV *"Terwujudnya personel Polri/PNS Polri yang profesional di bidang IT"* dengan arah kebijakan :
 - 1) Meningkatnya keterampilan serta pengetahuan personil Bid TIK Polda NTB dan Jajaran serta bertambahnya masa pakai Alkomlek dan strategi yang dilakukan adalah : *(giat 3071/ prog2/ Program dukungan manajemen).*
 - a) Melakukan reformasi/pengelolaan SDM secara professional sesuai dengan kompetensi dasar SDM dibidang IT
 - b) Meningkatkan kesejahteraan SDM

/2) meningkatkan...

- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri dan strategi yang dilakukan adalah : (*giat3071/prog2/ Program dukungan manajemen*)
 - a) Mengikut sertakan personel untuk melaksanakan Dikjur/Pelatihan dibidang IT baik di Mabes Polri atau di instansi terkait
 - b) Mengadakan pelatihan kepada personel Bid TIK dan jajaran

BAB IV

PROGRAM/KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN DAN KEGIATAN PRIORITAS TA. 2026 BID TIK POLDA NTB

7. Program dan Kegiatan Bid TIK Polda NTB

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
 - 1) Tujuan

Menyeleggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Polda dan Kewilayahan;
 - 2) Kegiatan

Penyeleggaran Teknologi Informasi berupa 1 layanan , laporan , dokumen , rekomendasi,unit dengan rincian sebagai berikut:

 - a) Bantuan Pelayanan Masyarakat berupa Belanja Barang Operasional Lainnya untuk kegiatan Dukungan Biaya Operasional Bidang TIK Polda NTB.
Volume = 4 Giat, 248 OH dan 1 layanan
 - b) ULP Non Organik / Jaga Fungsi berupa Belanja Pengadaan Bahan Makanan untuk kegiatan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
Volume = 730 OH (piket jaga Senkom)
- b. Program Dukungan Pelayanan Internal dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
 - 1) Tujuan

Mendukung Pelayanan Internal Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas terintegrasi antara Polda dan Kewilayahan;
 - 2) Kegiatan

Penyeleggaran Teknologi Informasi berupa 2 layanan, laporan, dokumen, rekomendasi ,unit dengan rincian sebagai berikut:

/a) dukungan...

- a) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan terdiri dari :
- (1) Honor operator pelaksana aplikasi Simak BMN, Sakpa, RKAKL dan SIRENA
Volume = 48 OB dan 1 layanan
 - (2) Belanja perjalanan dinas biasa daerah dalam kota Pulau Lombok dan luar kota Pulau Lombok.
Volume = 96 OH dan 1 layanan
- b) Pembayaran Gaji dan Tunjangan terdiri dari :
- (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Volume = 14 Bulan
 - (2) Belanja Uang Lembur untuk Lembur PNS,data Alkomlek, Volume = 405 Unit ,8 Set dan 1 layanan;
 - Lembur PNS Gol III
Volume = 504 OJ dan 1 layanan
 - Lembur PNS Gol II
Volume = 336 OJ dan 1 layanan
 - Makan Lembur PNS Gol III
Volume = 252 OH dan 1 layanan
 - Makan Lembur PNS Gol II
Volume = 168 OH dan 1 layanan
- c) Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kantor terdiri dari :
- 1) Honor Pengelola Keuangan KPA, PPSM, Bendahara dan Staf Pengelola.
Volume = 60 OB dan 1 layanan
 - 2) Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4/6/10 berupa Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Pemeliharaan Ranmor Roda 4,
Volume = 10 Unit dan 1 layanan
 - 3) Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 berupa Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Pemeliharaan Ranmor Roda 2.
Volume = 2 Unit dan 1 layanan

- 4) Perbaikan Peralatan Fungsional berupa Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Biaya Pemeliharaan Alat Fungsional Alkomlek, Alat pengolah data, Pemeliharaan Peralatan CC dan Perangkat 110
Alkomlek, Volume = 198 Unit, 10 Set dan 1 layanan;
Alat pengolah data, Volume = 33 Unit dan 1 layanan.
- 5) Usulan Material Satker Bid TIK pada (Pagu Ideal 2026) berupa Perbaikan Peralatan Fungsional berupa; Alkomlek, Volume = 64 Unit dan 2 Set dan 1 layanan;
KEK Mandalika, Volume = 85 Unit dan 5 Set;
Command Center, Volume = 212 Unit dan 1 Set dan 1 layanan;
Perangkat 110, Volume = 36 Unit dan 1 layanan ;
Alat pengolah data, Volume = 25 Unit dan 1 layanan.
- 6) Pengadaan Peralatan Kantor berupa Belanja Keperluan Perkantoran, belanja honor out-put kegiatan dan penggantian barang operasional lainnya.
Volume = 8 OT, , 1 OP ,53 OT dan 1 layanan
- 7) Biaya belanja langganan daya dan jasa lainnya : sewa jaringan komunikasi (leased channel) satelit.
Volume = 12 Bulan dan 1 layanan

8. Pagu Alokasi Bid TIK T.A. 2026

Tahun 2026 anggaran Bidang TIK Polda NTB sebesar **Rp. 9.054.132.000,-** bersumber dari Rupiah murni, dengan 1 (satu) program yang dijalankan yaitu "Program Dukungan Manajemen" serta 2 (dua) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Teknologi Informasi (3071) dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 123.943.000,-** bersumber dari Rupiah murni dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Biaya Operasional Satker Bidang TIK Polda NTB.
Anggaran = Rp. 75,033,000,-
 - 2) ULP Non Organik / Jaga Fungsi berupa Belanja Pengadaan Bahan Makanan untuk kegiatan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
Anggaran = Rp. 48,910,000,-

/b. Kegiatan...

b. Kegiatan Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073) dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 8.930.189.000,-** bersumber dari Rupiah murni dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Layanan Umum, Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan dengan anggaran sebesar **Rp. 22.810.000,-** terdiri dari :
 - a) Honor operator pelaksana aplikasi Simak BMN, Sakpa, RKAKL, dan Sirena dengan anggaran = Rp. 12.960.000,-
 - b) Dukungan Operasional Satker berupa Belanja Perjalanan Biasa untuk kegiatan Jaldis Dalam Kota Pulau Lombok dan Luar Pulau Lombok dengan anggaran sebesar Rp. 9,850,000,-
- 2) Layanan Perkantoran, Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri berupa Layanan Perkantoran dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.8.907.379.000,-** untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Gaji, Tunjangan, uang makan dan lembur PNS Polri dengan anggaran Rp. 4.460,134.000,- terdiri dari:
 - (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Anggaran = Rp. 4.429,424.000,-
 - (2) Belanja lembur PNS Gol III dan Gol II
Anggaran = Rp. 30,710,000,-
 - b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. **4.447.245.000,-** terdiri dari :
 - (1) Honor Pengelola Keuangan pelaksana KPA, PPSM, Bendahara dan Staf Pengelola
Anggaran = Rp. 28,728,000,-
 - (2) Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4/6/10 berupa Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Pemeliharaan Ranmor Roda 4.
Anggaran = Rp. 315.650.000,-
 - (3) Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 berupa Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Pemeliharaan Ranmor Roda 2.
Anggaran = Rp. 4.000.000,-

- (4) Perbaikan Peralatan Fungsional berupa Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan Biaya Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Comand Center ,Alat Fungsional Alkomlek, Alat Pengolah Data dan Perangkat 110.

Anggaran = Rp. 1,385,652,000

- (5) Belanja Langganan Daya dan Jasa lainnya sewa jaringan telekomunikasi (leased channel) satelit

Anggaran = Rp2,638,357,000

- (6) Pengadaan Peralatan Kantor berupa Belanja Keperluan Perkantoran dan penggantian barang operasional lainnya.

Anggaran = Rp. 68.900.000,-

Kegiatan Prioritas TA. 2026

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)	KET
1	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (003)	Layanan Teknologi Informasi Polri (3071.EBA. 963/ 003)/FS	Mendukung kegiatan operasional layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.Supervisi a.pulau Lombok b.Pulau sumbawa 2.Pengoptimalan a. Pulau Lombok b.Pulau sumbawa 3.Rakernis dan Kapuan fungsi TIK	Jumlah layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi tercapai.	 1 giat 1 Giat 10 Giat 2 Giat 1 Giat	Rp. 123,943,000	

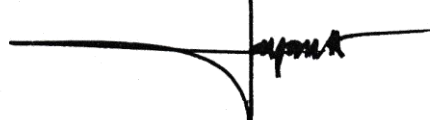
BAB V
PENUTUP

9. Penutup

Demikian Rencana Kerja Bidang TIK Polda NTB T.A. 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Bidang TIK Polda NTB Tahun 2026.

Ditetapkan : Mataram
pada tanggal : 20 Februari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



SURAT PERINTAH
Nomor. : Sprin/ 78 /V/REN./2025

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja pada Satker Bidang TIK Polda NTB T.A. 2026 dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERWIRA, BINTARA DAN PNS YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas menyusun Rencana Kerja Bidang TIK Polda NTB T.A. 2026;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Bidang TIK Polda NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Ditetapkan : Mataram
pada tanggal: 20 Mei 2025

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

Tembusan :

1. Kapolda NTB.
2. Irwasda Polda NTB.
3. Karo Rena Polda NTB.

DAFTAR TIM PENYUSUNAN RENJA T.A. 2026
SATKER BID TIK POLDA NTB

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM TEAM
1	YAYAN HARTADI, S.I.K.	KOMBES POL	KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB	PENANGGUNG JAWAB
2	I KADEK SUPARTA, A.Md	KOMPOL	PS. KASUBBIDTEKINFO	KETUA
3	I PUTU WIRANA, SIP	KOMPOL	KAUR HARKAN	WAKIL KETUA
4	LALU ARYA WIRAWAN	IPTU	PS. KAURMINTU	SEKRETARIS
5	I NYM KARYASA, S.H.	AIPTU	PS. KAUR KEU SUBBAG RENMIN	ANGGOTA
6	NAZARIZAL, AMK	PENATA	PS. PAMIN 1 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA
7	RIKY FIRMANSYAH	BRIGADIR	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA

Ditetapkan : Mataram

pada tanggal: 20 Mei 2025

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Latar Belakang	
1. Kondisi Umum.....	1
2. Identifikasi masalah.....	6
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas	
3. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Prioritas Polda NTB	9
4. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Prioritas BID TIK Polda NTB ...	10
BAB III Arah Kebijakan dan Strategi.	
5. Arah Kebijakan dan Strategi Polda NTB.....	11
6. Arah Kebijakan dan Strategi Bid TIK Polda NTB.....	28
BAB IV Program, Kegiatan, Pagu Indikatif dan Prioritas Kegiatan	
7. Program dan Kegiatan.....	31
8. Pagu Alokasi Bid TIK T.A 2026.....	32
BAB V Penutup	
9. Penutup.....	36
 LAMPIRAN I : RKT	
LAMPIRAN II : RKA-KL manual versi Bappennas	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



LAMPIRAN I
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BIDANG TIK POLDA NTB
TAHUN 2026

*
*
* * *
* * *
* * *
* * *
* 0 *
* 0 *
* 0 *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
*
*

Mataram, Februari 2026

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BID TIK POLDA NTB T.A. 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		2026	KET
1		2		4	5
SI	Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern	IKU	Indeks infrastruktur strategis TIK (IKU1+IKU2/2)	84% (2,92)	
SS. 1	Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	IKU.1	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern (ikp1+ikp2/2)	79,3% (2,43)	
		IKU.2	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel (ikp3+ikp4/2)	87% (3,4)	
SS. 2	Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	IKP.1	Indeks pengoptimalan/ penyelenggaraan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (10g)	79,3% (2,43)	
		IKP.2	Indeks Katpuan fungsi TIK (6g)	79,3% (2,43)	
		IKP.3	Indeks pengumpulan data (150g)	87% (3,4)	
		IKP.4	Indeks pengolahan dan penyajian data (150g)	87% (3,4)	

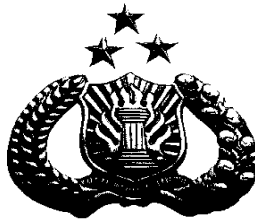
Mataram, Februari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



LAMPIRAN II

**RENCANA KERJA KEMETERIAN / LEMBAGA
(RENJA-KL) VERSI BAPPENAS MANUAL**

BIDANG TIK POLDA NTB

TAHUN ANGGARAN 2026

*
*
* * *
* * *
* * *
* * *
* 0 *
* 0 *
* 0 *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

Mataram,

Februari 2026

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



**PROGRAM DAN PENDANAAN
RENCANA KERJA KEMETERIAN / LEMBAGA
(RENJA-KL)**

BIDANG TIK POLDA NTB

T.A. 2026

*
*
* * *
* * *
* * *
* * *
* 0 *
* 0 *
* 0 *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
*
*

Mataram, Februari 2026

REKAP 1 : TAHUN ANGGARAN 2026
RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RA-RENJA K/L)

- I. KEMETERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA
- II. UNIT ORGANISASI : BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- III. VISI: : Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang profesional dan modern
- IV. MISI: : Peningkatan Kemampuan Dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- V. PRIORITAS NASIONAL

NO	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2026
	NIHIL	0
	TOTAL	0

VI. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET 2026	ALOKASI 2026
	Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern		9,337,131,000
	Indeks infrastruktur strategis TIK	2,92	
	Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern		
	Indeks infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	2.43	
	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	3.4	
01	Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntabel		
	Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet	2.43	
	Indeks Katpuan fungsi TIK	2.43	
01.01	Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data	3.4	
01.02	Indeks pengolahan, penyajian data	3.4	

VII. PROGRAM DAN PENDANAAN (RIBU RUPIAH)

KODE	PROGRAM	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9,337,131,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,337,131,000
TOTAL		9,337,131,000										9,337,131,000

Mataram, Februari 2026
KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB




YAYAN HARTADI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520



#REF!

#REF!

REKAP 2: PROGRAM K/L
RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RA-RENJA K/L)

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntable
- 3 PROGRAM
Program Dukungan Manajemen
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 3.B1):
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026
001	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi	3.4	
001.01	Jumlah kebijakan yang Layanan dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis	5 Kebijakan	
001.02	Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data (IKP.3)	3.4	
001.03	Indeks pengolahan, penyajian data (IKP.4)	3.4	
Total			9,208,399,000

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2026
001	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntable	9,208,399,000
Total		9,208,399,000

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	9,208,399,000						-			-	9,208,399,000
Total		9,208,399,000						-			-	9,208,399,000



Mataram, Februari 2026
 KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

AYAN HARTADI, S.I.K.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

REKAP 2: PROGRAM K/L
RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RA-RENJA K/L)

- 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG
Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern
- 3 PROGRAM
Program Modernisasi Almatsus, Sarana Prasarana Polri dan Program manajemen
- 4 UNIT ORGANISASI (ESELON 3.B1):
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 5 PRIORITAS

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2026
Total		

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

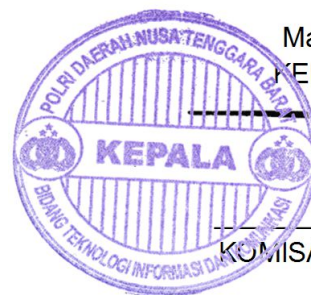
KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2026	ALOKASI 2026
002	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas	2.43	
002.01	Jumlah kebijakan Layanan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksanaan teknis	2Kebijakan	
002.02	Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern		
	- Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.1)	2.43	
	- Indeks Katpuan fungsi TIK (IKP.2)	2.43	
Total			128,732,000

7 OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM/INDIKATOR OUT PROGRAM	ALOKASI 2025
002	Indeks infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	128,732,000
Total		128,732,000

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	128,732,000						-			-	128,732,000
Total		128,732,000						-			-	128,732,000



Mataram, Februari 2026
KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

#VALUE!

|